

Program Keluarga Harapan sebagai Upaya Kebijakan Pemerintah Mengatasi Kemiskinan di Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan

Fitri Nurzana^{1*}, Yudhanto Satyagraha Adiputra², Khairi Rahmi³

¹⁻³Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Jl. Raya Dompok, Dompok, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia

Korespondensi penulis: fitrinurzana34@gmail.com*

Abstract. Gunung Kijang Subdistrict in Bintan Regency is one of the areas still facing various socio-economic challenges, particularly related to poverty issues. The problems faced include low income, limited access to education and healthcare, lack of employment opportunities, and low quality of life. Therefore, the Family Hope Program (PKH) is present as a social policy intervention from the government to help reduce the impact of poverty both directly and in the long term in Gunung Kijang by fulfilling basic needs, increasing participation in education, raising awareness of the importance of health, and empowerment through social assistance. This study aims to determine the extent of PKH's effectiveness in reducing poverty rates in Gunung Kijang Subdistrict, Bintan Regency. The study uses a qualitative approach with a descriptive method. Data collection techniques include interviews, direct field observations, and documentation. In its analysis, this study refers to William N. Dunn's public policy evaluation theory, which includes six main indicators: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. The results show that PKH has a positive impact on beneficiary families (KPM). The program increases school attendance of children from poor families in primary and secondary schools, as attendance is an important component in the disbursement of aid. In addition, PKH encourages poor communities to be more active in accessing health services, such as community health centers (puskesmas) and integrated health service posts (posyandu), especially for vulnerable groups such as pregnant women, toddlers, and the elderly. The Family Hope Program (PKH) contributes to reducing the impact of poverty in Gunung Kijang Subdistrict. Although it has not fully resolved the root problems, PKH has the potential to be a tool to break the cycle of poverty and improve the quality of life of poor communities sustainably.

Keywords: Basic Needs, Family Hope Program (PKH), Government Policy, Poverty, Society

Abstrak. Kecamatan Gunung Kijang di Kabupaten Bintan merupakan salah satu wilayah yang masih menghadapi berbagai tantangan sosial-ekonomi, terutama terkait dengan masalah kemiskinan. Adapun permasalahan yang di hadapi yaitu pendapatan yang rendah, akses terhadap pendidikan dan kesehatan juga terbatas keterbatasan lapangan pekerjaan dan rendahnya kualitas hidup. Maka dari itu, PKH hadir sebagai salah satu intervensi kebijakan sosial dari pemerintah untuk membantu mengurangi dampak kemiskinan secara langsung maupun jangka panjang di Gunung Kijang yaitu dengan pemenuhan kebutuhan dasar, meningkatkan partisipasi pendidikan kesadaran akan pentingnya Kesehatan serta pemberdayaan melalui pendampingan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas PKH dalam mengurangi angka kemiskinan di Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi langsung di lapangan, serta dokumentasi. Dalam analisisnya, penelitian ini mengacu pada teori evaluasi kebijakan publik menurut William N. Dunn, yang mencakup enam indikator utama: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKH memberikan dampak positif bagi keluarga penerima manfaat (KPM). Program ini meningkatkan kehadiran anak-anak dari keluarga miskin di sekolah dasar dan menengah, karena syarat kehadiran menjadi komponen penting dalam pencairan bantuan. Selain itu, PKH mendorong masyarakat miskin untuk lebih aktif mengakses layanan kesehatan, seperti puskesmas dan posyandu, terutama bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, dan lansia. Program Keluarga Harapan (PKH) berkontribusi dalam mengurangi dampak kemiskinan di Kecamatan Gunung Kijang. Meskipun belum sepenuhnya menyelesaikan akar permasalahan, PKH ini memiliki potensi sebagai alat untuk memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin secara berkelanjutan

Kata kunci: Kebutuhan Dasar, Program Harapan Keluarga (PKH), Kebijakan Pemerintah, Kemiskinan, Masyarakat

1. LATAR BELAKANG

Dalam upaya mengurangi kemiskinan, pemerintah melaksanakan berbagai program pemberdayaan, salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini merupakan bantuan sosial bersyarat yang bertujuan untuk menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Di tingkat global, program ini dikenal sebagai Conditional Cash Transfers (CCT). Sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 2007, Dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) bisa membantu menurunkan tingkat kemiskinan dan menjadi pendorong kemandirian keluarga penerima manfaat (KPM) sebagai penerima bantuan sosial.

Bantuan yang disalurkan pemerintah kepada penerima disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kategori. Program Keluarga Harapan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga penerima manfaat dengan menyediakan akses ke program kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Selain itu, program ini dirancang untuk meringankan beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, mengubah pola pikir mereka, mendorong kemandirian, serta mengurangi kesenjangan kemiskinan.

Dengan adanya PKH ini bisa membantu mengurangi beban kemiskinan yang dirasakan oleh masyarakat yang menerima bantuan. Dengan memberikan fasilitas pelayanan maupun pendidikan serta akses-akses peningkatan kesejahteraan sosial. Dengan terbentuknya program ini berharap agar dimasa yang akan mendatang masyarakat miskin bisa terbebas dari kemiskinan sehingga bisa menjalankan sebaik mungkin. dengan generasi yang akan mendatang bisa memperhatikan dari segi pendidikan, kesehatan sekaligus bisa memberikan akses layanan kepada kelompok non aktif seperti lansia dan disabilitas.

Untuk Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Gunung Kijang itu sendiri belum sepenuhnya mencapai tujuan . meskipun ada peningkatan pada jumlah penerima PKH masih ada tantangan seperti kurangnya komunikasi dan koordinasi antara pedamping PKH dan masyarakat penerima PKH, data penerima PKH yang tidak akurat juga menjadi penyebab tantangan dalam program PKH dan beberapa keluarga yang layak tidak terdaftar dan sebaliknya, kurangnya efektivitas yang menunjukkan bahwa program ini belum sepenuhnya mencapai target pengentasan kemiskinan dengan banyak keluarga yang seharusnya menerima bantuan tidak terdaftar atau tidak mendapatkan manfaat yang cukup. serta keterbatasan sarana prasarana masih menjadi penghambat efektivitas program sehingga harus dilakukan evaluasi dari program tersebut. Sehingga dengan adanya program keluarga harapan (PKH) yang diberikan apakah bisa mengatasi kemiskinan yang ada di Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan bisa menurun.

2. KAJIAN TEORITIS

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang di ambil sebagai referensi dalam penulisan karya ilmiah oleh penulis yaitu:

Jurnal yang ditulis oleh Maya Dehani, Denny Hernawan, dkk pada tahun 2018. Penelitian ini dengan judul “Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Bogor. Program ini telah berhasil mengatasi berbagai permasalahan klasik yang dialami oleh Rumah Tangga Sasaran Miskin (RTSM), seperti gizi buruk, tingginya angka kematian ibu dan bayi, serta rendahnya tingkat partisipasi anak dalam pendidikan. Pencapaian utama pelaksanaan PKH di Kecamatan Bogor Selatan adalah membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pendidikan serta layanan kesehatan bagi ibu dan balita. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan dari William N. Dunn, yang menilai keberhasilan program berdasarkan enam variabel: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Fokus utama pembahasan dalam penelitian ini adalah aspek pendidikan, serta kesehatan ibu dan balita. Sedangkan penelitian sekarang lebih memfokuskan kepada semua aspek baik itu dari pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat miskin (Dehani et al., 2018).

Selanjutnya skripsi yang di tulis oleh Hasbian Aisyah Mardi pada Tahun 2024. Dengan judul “Dinamika Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Kampung Bugis. Hasil penelitian ini membahas dinamika Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Kampung Bugis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dinamika Program Keluarga Harapan (PKH) baik dari perspektif penerima manfaat PKH maupun pendamping PKH di Kelurahan Kampung Bugis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori strukturalisasi dari Anthony Giddens, yang membahas tentang dualitas yang terjadi dalam praktik sosial yang berulang dan terstruktur di berbagai ruang dan waktu (Aisyah Mardi et al., 2024). Perbedaan pada penelitian ini yaitu, penelitian ini dilakukan di Kampung Bugis keluraha ini memiliki karakteristik sosial dan budaya yang khas termasuk keberadaan masyarakat pesisir dengan berbagai dinamika ekonomi. Pada penelitian ini mengeksplorasi interaksi, tantangan interaksi, serta pengaruh program terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir. Sedangkan penelitian yang dilakukan sekarang yaitu, tantangan utama berupa keterbatasan akses terhadap fasilitas dasar, infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan yang ada di kecamatan gunung kijing. Pada penelitian ini juga menganalisis efektivitas program, hambatan implementasi, dan dampak kebijakan terhadap kondisi kemiskinan di Kecamatan Gunung Kijing.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Bella Sapira pada tahun 2023. Dengan judul “Evaluasi Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Moro Kabupaten Karimun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, secara umum telah berjalan sesuai dengan ketentuan dalam PERMENSOS No. 10 Tahun 2017 tentang PKH. Namun, dampak program ini terhadap penurunan angka kemiskinan masih belum signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak implementasi PKH di Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, melibatkan 18 informan. Selanjutnya pada penelitian ini menggunakan teori evaluasi Bridgman & David (2020) dengan 4 indikator yaitu Input, Process, Output, Outcomes (Sapira et al., 2023). Perbedaan pada penelitian ini merupakan daerah kepulauan dengan karakteristik geografis yang terdiri pulau-pulau kecil. Kondisi ini mempengaruhi implementasi PKH, terkait aksesibilitas terhadap layanan publik. Penelitian ini juga berfokus pada evaluasi pelaksanaan PKH dengan menganalisis terhadap keberhasilan program dalam mencapai tujuan yang spesifik seperti peningkatan kesejahteraan keluarga miskin, dan mengidentifikasi kendala implementasi di wilayah tersebut.

Selanjutnya jurnal yang ditulis oleh Alman Manongga, Sofia Pangemanan, dkk pada tahun 2018. Penelitian ini dengan judul “Implementasi Program Keluarga Harapan dalam mengatasi kemiskinan di Kelurahan Pinokalan Kota Bitung”. Hasil penelitian ini Dalam pengamatan di lapangan, ditemukan berbagai permasalahan dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan, seperti yang terlihat dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Meskipun banyak program yang dijalankan, upaya pengentasan kemiskinan belum efektif karena kurangnya dukungan untuk usaha produktif yang berkelanjutan, kurangnya sinkronisasi antara program pemerintah dan kebutuhan masyarakat, serta adanya ego sektoral dalam pelaksanaan program. Selain itu, penggunaan anggaran lebih fokus pada proyek jangka pendek daripada hasil jangka panjang, dan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum optimal. Partisipasi masyarakat juga masih terbatas, tidak berbasis pada kemandirian, sehingga program-program pengentasan kemiskinan belum berjalan dengan baik dalam kehidupan masyarakat miskin. Tujuan dari penelitian ini untuk dapat mengetahui implementasi Program Keluarga Harapan dapat mengatasi kemiskinan di Kelurahan Pinokalan Kota Bitung. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori Gorge C. Edward yang mengukur suatu keberhasilan implementasi kebijakan melalui dari 4 indikator yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Metode pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan lokasi di Kelurahan Pinokalan Kota Bitung (Manongga et al., 2018). Pada penelitian ini kota Bitung

memiliki akses yang relative lebih baik terhadap infrastruktur dan layanan publik. Dalam hal ini tantangan PKH di wilayah ini melibatkan dinamika sosial masyarakat perkotaan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Menurut Denzin & Lincoln (1994) Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan konteks untuk menginterpretasikan fenomena yang terjadi, dengan melibatkan berbagai metode yang telah ada (Anggito & Setiawan, 2018). Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian di mana peneliti menggunakan kemampuan wawancara atau pengamat untuk mengumpulkan data tentang masalah yang diteliti (Aminah, 2019). Menurut Moeleong, Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, termasuk perilaku, persepsi, tindakan, dan motivasi mereka. Penelitian ini dilakukan secara mendalam dengan deskripsi yang menggunakan kata-kata dan bahasa dalam konteks alami, serta memanfaatkan berbagai metode yang sesuai. (Narbuko & Achmadi, 2005). sebuah penelitian kan memenuhi kriteria penelitian ilmiah ketika dalam penelitian nya menggunakan metodologi tertentu sebagai bentuk apresiasi dalam pengetahuannya (Fajri et al., 2017) .

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bentuk bantuan sosial bersyarat yang diberikan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, dengan tujuan utama membantu keluarga msiskin agar dapat lebih mudah mengakses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Di wilayah Kecamatan Gunung Kijang, pelaksanaan program ini dikoordinasikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bintan dan didukung oleh pendamping PKH yang bertugas di lapangan.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan sebelum menerima bantuan PKH, sebagian besar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Gunung Kijang hidup dalam kondisi sosial ekonomi yang rentan. Kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan anak belum terpenuhi secara optimal. Anak-anak sering tidak bersekolah secara rutin, dan kunjungan ke fasilitas kesehatan sangat jarang dilakukan. Partisipasi keluarga dalam kegiatan sosial dan pemberdayaan pun minim. KPM cenderung pasif, bergantung pada bantuan lingkungan, dan memiliki kesadaran rendah terhadap pentingnya pendidikan dan kesehatan, akibat keterbatasan ekonomi dan wawasan. Lingkungan tempat tinggal tidak layak, dengan akses terbatas terhadap air bersih, sanitasi, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan. Respon masyarakat umumnya diliputi rasa cemas dan putus asa terhadap kondisi kemiskinan yang berlangsung lama. Banyak

warga tidak mengetahui program bantuan pemerintah atau meragukan efektivitasnya, meski tetap menyimpan harapan akan adanya perubahan.

Untuk proses penyaluran bantuan PKH ini di bagi menjadi 2 penyaluran ada yang dari rekening BRI yang masyarakat pegang sendiri dan penyaluran ke dua dari pihak kantor pos. Hal ini terjadi di karenakan untuk menyesuaikan dengan kondisi geografis yang ada di Kecamatan Gunung Kijang, ketersediaan layanan perbankan yang mana di kecamatan Gunung Kijang layanan perbankan itu cuman ada satu dan kapasitas penerima PKH sehingga harus di bagi menjadi dua untuk proses penyaluran PKH.

Hal ini telah di atur dalam permensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang program keluarga harapan kriteria KPM PKH menurut permensos ini yaitu. Terdaftar ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), memiliki komponen ibu hamil, anak usia dini (0-6 tahun), anak SD, anak SMP, anak SMA, lansia (kurang lebih 70 tahun), penyandang disabilitas berat. Di sisi positif, meningkatnya jumlah KPM juga mengindikasikan bahwa cakupan bantuan sosial semakin meluas, yang berpotensi mempercepat tercapainya keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Meski begitu, lonjakan jumlah penerima ini menuntut kesiapan dari segi pendanaan dan mekanisme penyaluran agar bantuan tetap sampai kepada yang benar-benar membutuhkan secara tepat waktu dan sasaran. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pendataan, monitoring, dan evaluasi agar pelaksanaan PKH tetap efisien dan efektif meskipun terjadi peningkatan jumlah penerima.

Dengan adanya program PKH ini juga sangat membantu memberikan dampak yang baik bagi para penerima PKH terutama dalam hal pendidikan program PKH ini berhasil meningkatkan angka kehadiran siswa dari KPM di sekolah dasar dan menengah. Para orang tua lebih termotivasi anaknya karena adanya syarat kehadiran sebagai komponen pencairan bantuan. Tidak hanya itu Program PKH turut memberikan dampak positif dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, terutama bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, dan lansia. Keluarga penerima manfaat secara rutin mengunjungi puskesmas atau posyandu sebagai bentuk kepatuhan terhadap syarat yang ditetapkan dalam program tersebut.

Dukungan berupa bantuan tunai dari Program Keluarga Harapan (PKH) berperan dalam mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok dan biaya pendidikan. Walaupun belum memberikan peningkatan pendapatan yang berarti, program ini dianggap mampu menjaga kestabilan kondisi ekonomi rumah tangga penerima. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan berkaitan dengan apakah dengan program keluarga

harapan (PKH) dapat mengatasi angka kemiskinan yang ada di Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pelaksanaan PKH di Kecamatan Gunung Kijang dinilai cukup efektif oleh berbagai pihak, mulai dari Dinas Sosial, pendamping PKH, camat, hingga masyarakat penerima manfaat. Efektivitas program ditunjukkan melalui peningkatan partisipasi sekolah anak-anak dari keluarga penerima, keaktifan ibu hamil dan balita dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan, serta adanya perubahan perilaku yang lebih produktif dalam pengelolaan keuangan rumah tangga. Namun demikian, efektivitas program belum sepenuhnya optimal. Beberapa kendala masih dihadapi, seperti keterlambatan penyaluran bantuan, data penerima yang kurang akurat, serta rendahnya pemahaman sebagian masyarakat tentang tujuan program PKH sebagai upaya pemberdayaan, bukan semata bantuan konsumtif. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi berkala dan perbaikan sistem pelaksanaan di tingkat daerah.

Keberhasilan PKH tidak hanya tergantung pada besarnya bantuan yang diberikan, tetapi juga pada kualitas pendampingan, sinergi antar instansi, dan partisipasi aktif masyarakat. Ketika program dijalankan secara terintegrasi, dengan pendekatan edukatif dan penguatan kapasitas keluarga, maka PKH dapat menjadi langkah strategis dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi.

Dalam upaya mengurangi kemiskinan, pemerintah melaksanakan berbagai program pemberdayaan, salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini merupakan bantuan sosial bersyarat yang bertujuan untuk menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Di tingkat global, program ini dikenal sebagai Conditional Cash Transfers (CCT). Sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 2007, Dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) bisa membantu menurunkan tingkat kemiskinan dan menjadi pendorong kemandirian keluarga penerima manfaat (KPM) sebagai penerima bantuan sosial.

2. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, saran peneliti untuk objek dalam penelitian ini pertama, pemerintah daerah bersama Dinas Sosial perlu melakukan pemutakhiran dan validasi data penerima PKH secara berkala untuk memastikan bahwa program ini benar-benar tepat sasaran. Kedua, efektivitas Program Keluarga Harapan dapat ditingkatkan melalui penguatan kapasitas para pendamping PKH.

Ketiga, diperlukan sinkronisasi antarinstansi dan pemerintahan desa dalam pelaksanaan PKH. Keempat, masyarakat penerima PKH perlu diberi pemahaman yang lebih dalam mengenai tujuan jangka panjang program ini, yaitu untuk mendorong kemandirian ekonomi, bukan hanya sebagai bentuk bantuan konsumtif. Kelima, sebagai bentuk evaluasi dan transparansi, sebaiknya pemerintah daerah menyusun laporan tahunan tentang dampak PKH di Kecamatan Gunung Kijang dan membuka ruang partisipasi publik dalam menilai keberhasilan program.

DAFTAR REFERENSI

- Aisyah, Mardi, H., Rahmawati, N., & Adiputra, Y. S. (2024). Dinamika Program Keluarga Harapan di Kelurahan Kampung Bugis. Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Andina, W., & Wahyudi, A. (2024). Upaya pengentasan kemiskinan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial Islami. *Jurnal Ekonomi, Sosial, dan Bisnis Pembangunan*, 9(1), 69–80. <https://doi.org/10.37366/jespb.v9i01.1066>
- Dehani, M., Hernawan, D., & Purnamasari, I. (2018). Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor. *Jurnal Governansi*, 4(1), 45–56. <https://doi.org/10.30997/jgs.v4i1.1140>
- Dewi, N. L. Y. (2019). Dinamika collaborative governance dalam studi kebijakan publik. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3(2), 200–210. <https://doi.org/10.38043/jids.v3i2.2188>
- Fajri, D. K., Kharisma, A. P., & Dewi, R. K. (2017). Perancangan website unit kegiatan mahasiswa dengan metodologi user centered design. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 1(12), 1833–1841. <http://j-ptiik.ub.ac.id>
- Indika, M., & Marliza, Y. (2019). Upaya pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam mengatasi kemiskinan di Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas. *Mimbar Administrasi*, 18(3), 49–66. <https://doi.org/10.33557/mbia.v18i3.598>
- Izzati, R. A. (2021). Situasi kemiskinan selama pandemi. *SMERU Research Institute*. <https://smeru.or.id/id/article-id/situasi-kemiskinan-selama-pandemi>
- Jogiyanto, H. M. (2018). *Metoda pengumpulan dan teknik analisis data*. Penerbit Andi.
- Kadji, Y. (2012). Kemiskinan dan konsep teoritisnya. *Guru Besar Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo*, 17.
- Kurniawan, A., Hakim, L., & Ramdani, R. (2021). Evaluasi kebijakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Karawang Barat. *Gorontalo Journal of Government and Political Studies*, 4(1), 40–51. <https://doi.org/10.32662/gjgops.v4i1.1233>
- Lukitasari, S. W., Sulasmono, B. S., & Iriani, A. (2017). Evaluasi implementasi kebijakan pendidikan inklusi. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 4(2), 121–134. <https://doi.org/10.24246/j.jk.2017.v4.i2.p121-134>

- Manongga, A., Pangemanan, S., & Kairupan, J. (2018). Implementasi Program Keluarga Harapan dalam mengatasi kemiskinan di Kelurahan Pinokalan Kota Bitung. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Pengembangan Masyarakat sebagai Strategi Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga melalui Program Keluarga Harapan di RW 01 Kelurahan Kalibaru Kecamatan. (2024). *Multidisciplinary Science*, 1(11), 599–609.
- Purwanto, S. A., Sumartono, S., & Makmur, M. (2013). Implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam memutus rantai kemiskinan (Kajian di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto). *Wacana: Journal of Social and Humanity Studies*, 16(2), 79–96.
- Rahmawati, E., & Kisworo, B. (2017). Peran pendamping dalam pemberdayaan masyarakat miskin melalui Program Keluarga Harapan. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 161–169. <https://doi.org/10.15294/pls.v1i2.16271>
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 1–12.
- Rapi Harahap. (2024). Apa itu bantuan PKH Kementerian Sosial dan siapa saja yang bisa dapat.
- Rizayani, S., & Syaharuddin, M. (2023). Kebijakan pengentasan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan di Kota Banjarbaru. *Kajian-Kajian Lokal Kalimantan Selatan*, 65. <https://doi.org/10.20527/pakis.v2i1.5209>
- Roidah, I. S. (2018). Evaluasi kebijakan pengentasan kemiskinan dalam Program Keluarga Harapan di Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Agribis*, 4(1), 39–47.
- Sapira, B., Winarti, N., & Adiputra, Y. S. (2023). Evaluasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Moro Kabupaten Karimun. Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Serliana, J., Susilo, K. D., & Pramono, S. (2024). Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga di Kelurahan Babat Kabupaten Lamongan. *Soetomo Administrasi Publik*, 2(1), 225–236.
- Sofianto, A. (2020). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Jawa Tengah. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 10(1), 14–31. <https://doi.org/10.33007/ska.v10i1.2091>
- Suryahadi, A., & Satria, G. (2019). Harapan bagi Program Keluarga Harapan: Peningkatan kesejahteraan berkelanjutan. *SMERU Research Institute*. <https://smeru.or.id/id/node/2007>
- Triono, T. A., & Sangaji, R. C. (2023). Faktor mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia: Studi literatur laporan data kemiskinan BPS tahun 2022. *Jurnal Sosial dan Bisnis*, 1, 59–67. <https://doi.org/10.59012/jsb.v1i1.5>
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan penelitian pendidikan: Metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kombinasi (mixed method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896–2910.